



Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Aparatur Pemerintah terhadap Pencegahan *Fraud* Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Kota Pekalongan)

Fangela Myas Sari¹, Anni Safitri², Aria Elshifa³

Program studi Akuntansi, Fakultas Desain Kreatif Dan Bisnis Digital, Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan

Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Balekambang Jepara

Program studi Administrasi Perkantoran, Fakultas Desain Kreatif Dan Bisnis Digital, Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama

ARTICLE INFORMATION

Received: January 15, 2024
Revised: May 13, 2024
Available online: June 30, 2024

KEYWORDS

Fraud Prevention, Implementation of Public Sector Accounting, Quality of Government Apparatus

CORRESPONDENCE

Name: Fangela Myas Sari
E-mail: fangelamyassari@gmail.com

A B S T R A C T

This study discusses how the application of public sector accounting and the quality of government officials in preventing financial reporting fraud in the Pekalongan city government and the purpose of this study is to examine how fraud prevention is influenced by organizational ethical behavior and internal control systems. BPK found a number of problems in cases of low quality financial reporting and non-compliance with statutory provisions. Methodology Approach, Design and Methodology Participants in this study consisted of OPD staff in Pekalongan City totaling 61 respondents and for the sample using Purposive sampling is a sampling technique, while direct surveys and questionnaire distribution are survey methods. Analysis with the Smart PLS Version 3.0 Application. Based on the research findings, the SAP implementation variables and the quality of government officials have a significant effect on preventing financial reporting fraud.

PENDAHULUAN

Secara umum penelitian ini membahas mengenai pencegahan *fraud* laporan keuangan namun, untuk secara khusus penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengaruh antara penerapan akuntansi sektor *public* dan kualitas aparatur pemerintah terhadap pencegahan *fraud* laporan keuangan. *Fraud* di Indonesia masih banyak terjadi di organisasi *public* maupun swasta dan pada kenyataannya masih banyak tindakan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang prakteknya banyak terjadi di Indonesia pada sektor bisnis, hal tersebut merupakan tindakan kecurangan (Primastiwati et al., 2020). Sari (2024) menambahkan *Fraud* sebagai tindakan yang tidak baik yang dapat merugikan banyak pihak. Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary* *mfraud* didefinisikan sebagai semua macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencakup semua cara yang tak terduga (Garner, 2004).

Sari (2024), mengemukakan tidak hanya beberapa perusahaan saja yang bisa melakukan tindakan *fraud*, banyak sektor lini perusahaan yang masih melakukan tindakan *fraud*, baik di sektor publik maupun swasta harus menerbitkan laporan keuangan yang secara lengkap dengan ini maka, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus ditingkatkan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Fenomena yang terjadi di Indonesia dalam era reformasi sektor publik saat ini adalah menguatnya tuntutan keterbukaan dan akuntabilitas publik dalam proses pembangunan manajemen pemerintahan. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pemerintahan yang baik telah mendorong Pemerintah Daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Basuki et al., 2022).

Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 (Lailatul Mukaromah & Paulinus, 2022).

Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan antara lain, dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevancy*), andal (*reliability*) dan dapat dibandingkan (*comparability*). Apabila pemerintah mampu menerapkan dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas seperti disyaratkan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui penerapan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) berbasis akrual yang merupakan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Dewi, 2020).

Faktor faktor yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud* laporan keuangan, yaitu adanya penerapan akuntansi sektor *public*, yaitu merupakan teori akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi keuangan, terutama pelaporan keuangan kepada pihak eksternal. Teori akuntansi sektor publik sendiri sebenarnya masih dipertanyakan apakah benar ada teori akuntansi sektor publik. Sektor swasta yang perkembangan akuntansinya lebih pesat saja oleh beberapa ilmuwan masih dipertanyakan apakah sampai saat ini benar-benar memiliki teori akuntansi yang mapan (Maqdllyan, 2022). Suatu teori perlu didukung berbagai riset yang di dalamnya terdapat hipotesa-hipotesa yang diuji kebenarannya. Menurut Mardiasmo (2018), teori memiliki tiga karakteristik dasar, yaitu : (1) kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada (*the ability to explain*), (2) kemampuan untuk memprediksi (*the ability to predict*), (3) kemampuan mengendalikan fenomena (*the ability to control given phenomena*).

Faktor yang kedua, yaitu variabel kualitas aparatur pemerintah. Menurut Daniel & Yohanes (2013), sumber daya manusia atau kualitas aparatur pemerintah adalah suatu sumber daya yang sangat di butuhkan oleh organisasi sektor publik yang berfungsi untuk mengelola operasional di organisasi pemerintah daerah demi mewujudkan visi dan misi pemerintah. Kualitas aparatur dalam pemerintah, yaitu Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).

Selena (2022), mengemukakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan telah memeriksa 541 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 dari 542 Pemda pada semester I/2022. Dari 541 Pemda, sebanyak 500 Pemda memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 38 Pemda memperoleh opini Wajar dengan Pengecualian (WDP), dan tiga Pemda memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat/TMP. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Isma Yatun menyampaikan bahwa sebanyak 41 LKPD belum memperoleh opini WTP. "Penyebabnya, yakni terdapat permasalahan yang mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan, antara lain pada akun aset tetap dan akun belanja modal.

Bernard (2023), mengatakan terpidana korupsi di Pekalongan, M Teguh Imanto mengembalikan duit pengganti korupsi dan denda Rp 1,57 miliar ke Kejaksaan Negeri Pekalongan. Kasus yang menjerat Teguh Imanto ini dilakukan saat menjabat sebagai Dirut RSUD Kraton Pekalongan. Penelitian terdahulu mengenai pencegahan *fraud* dalam laporan keuangan pernah diteliti oleh Khairan et al., (2024), dengan judul Dampak Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Terhadap Pencegahan *Fraud* (Studi Kasus Kabupaten Aceh Utara, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel X1 akuntansi sektor publik memiliki dampak signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada daerah Kabupaten Aceh Utara. Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik secara partial maupun secara bersama-sama. Pambelum (2018), penelitian yang dilakukan oleh Triwahyudi (2020), mengenai pencegahan *fraud* dengan hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Selanjutnya kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* melalui kualitas laporan

keuangan Kompetensi Aparatur (SDM) berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* laporan keuangan (Sari, 2024).

Menurut Camila et al., (2021), aparatur pemerintah sangat erat dengan sikap profesionalisme dimana saling berkaitan untuk mencegah penggelapan dan penipuan pajak, karena sistem pengendalian yang baik harus dilakukan oleh seseorang yang mempunyai sikap profesionalisme yang tinggi sehingga dapat mencegah penggelapan dan penipuan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian internal dan profesionalisme dalam mencegah penghindaran dan penipuan pajak di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Terhadap Pencegahan *Fraud* Laporan Keuangan (Studi Empiris di Kota Pekalongan). Novelty dalam penelitian ini, yaitu adanya penambahan variabel kualitas aparatur pemerintah yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud* laporan keuangan.

METODE

Penelitian korelasional menguji pengaruh keterikatan antar variabel (Nurhayati, 2012). Penelitian ini menggunakan responden para Staff Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Kota Pekalongan sebagai responden penelitian. Selain itu, metode pengambilan sampel dengan cara purposive sampling, yang berarti pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang digunakan dalam metode pengambilan sampel. dengan kriteria sebagai berikut:

- Para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan
- Responden dalam penelitian ini adalah kepala atau staf subbagian akuntansi atau penatausahaan keuangan.
- Responden dalam penelitian ini adalah kepala atau staf subbagian akuntansi atau penatausahaan keuangan yang memiliki masa kerja minimal 1 tahun masa kerja.

Data awal digunakan untuk penelitian ini, peneliti mengirimkan 70 kuesioner, dan 9 kuesioner yang tidak kembali dari jumlah kuesioner yang kembali dan telah diproses sebanyak 61 kuesioner. Teknik analisis dan Pengujian menggunakan *Smart PLS* versi 3.0 dalam penelitian ini adalah uji Uji Validitas Konvergen, Uji Reliabilitas, Uji *Discriminant*, Evaluasi *Structural Model* dan Analisis Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen.

Hipotesis Penelitian

- Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap pencegahan *fraud* laporan keuangan

Teori akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi keuangan, terutama pelaporan keuangan kepada pihak eksternal. Teori akuntansi sektor publik sendiri sebenarnya masih dipertanyakan apakah memang ada teori akuntansi sektor publik. Sektor swasta yang perkembangan akuntansinya lebih pesat saja oleh beberapa ilmuwan masih dipertanyakan apakah sampai saat ini benar-benar memiliki teori akuntansi yang mapan. Suatu teori perlu didukung berbagai riset yang didalamnya terdapat hipotesa-hipotesa yang diuji kebenarannya. Menurut Mardiasmo (2018), teori memiliki tiga

karakteristik dasar yaitu : (1) kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada (*the ability to explain*), (2) kemampuan untuk memprediksi (*the ability to predict*), (3) kemampuan mengendalikan fenomena (*the ability to control given phenomena*).

H1: Penerapan ASP berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* laporan keuangan

2. Pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah Terhadap pencegahan *fraud* laporan keuangan

Menurut Daniel & Yohanes (2013), sumber daya manusia atau kualitas aparatur pemerintah adalah suatu sumber daya yang sangat di butuhkan oleh organisasi sektor publik yang berfungsi untuk mengelola operasional di organisasi pemerintah daerah demi mewujudkan visi dan misi pemerintah. Kualitas aparatur dalam pemerintah yaitu Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).

Penelitian yang dilakukan oleh Triwahyudi (2020), mengenai pencegahan fraud dengan hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Selanjutnya kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud melalui kualitas laporan keuangan. Kompetensi Aparatur (SDM) berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud laporan keuangan (F. M. Sari, 2024). Menurut Camila et al., (2021), aparatur pemerintah sangat erat dengan sikap profesionalisme dimana saling berkaitan untuk mencegah penggelapan dan penipuan pajak, karena sistem pengendalian yang baik harus dilakukan oleh seseorang yang mempunyai sikap profesionalisme yang tinggi sehingga dapat mencegah penggelapan dan penipuan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian internal dan profesionalisme dalam mencegah penghindaran dan penipuan pajak di Indonesia. Jadi dapat di katakana bahwa kualitas aparatur pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan fraud laporan keuangan

H2: Pengaruh kualitas aparatur pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud laporan keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Validitas Konvergen (Convergent Validity)

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Konvergen

Variabel	Loading And Cross Loading	Keterangan
Penerapapn ASP		
Item 1	0,897	Valid
Item 2	0,788	Valid
Item 3	0,899	Valid
Kualitas Aparatur		
Item 1	0,888	Valid
Item 1	0,777	Valid
Item 2	0,799	Valid
Pencegahan Fraud		
Item 1	0,877	Valid
Item 2	0,698	Valid
Item 3	1,000	Valid
Item 4	0,989	Valid

Sumber: data primer yang diolah (2024)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa setiap indikator pernyataan valid. Untuk melihat valid tidaknya indikator pernyataan dilihat melalui Nilai *combine loading*, yaitu harus mencapai nilai antara 0,5 dan 0,6 pernyataan tersebut dapat diterima dan valid (Yamin dan Kurniawan, 2011). Namun, jika nilai kurang dari < 0,5 maka harus dihilangkan dalam model penelitian. Hasil di atas menunjukkan setiap item pernyataan memiliki nilai lebih dari > 0,5 maka dinyatakan valid

2. Uji Reliabilitas dan Validitas

Composite reliability

Composite reliability menguji nilai reliabilitas antara blok indikator dari konstruk yang membentuknya. Adapun hasil output *composite reliability* dapat diketahui pada tabel 2 di bawah ini

Tabel 2. Hasil Composite Reliability dan Validity

Variabel	Composite Reliability	cronbach's alpha	Average variance extracted (AVE)
Penerapan SAP	0.778	0.799	0.568
Kualitas Aparatur	0.1000	0.1000	0.1000
Pencegahan <i>Fraud</i>	0.987	0.800	0.877

Sumber: data primer yang diolah (2024)

Hasil pada tabel 2 menunjukkan bahwa diperoleh nilai *composite reliability* untuk variabel variabel Penerapan SAP sebesar 0,778 variabel Kualitas aparatur sebesar 0,100 dan untuk variabel pencegahan (*Fraud*) sebesar 0,987. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *composite reliability* > 0,70. Dengan demikian model dalam penelitian ini telah memenuhi *composite reliability*. Untuk nilai *average variance extracted* (AVE) menunjukkan bahwa diperoleh nilai *average variance extracted* (AVE) untuk variabel penerapan SAP 0,568, variabel kualitas aparatur pemerintah 0,1000 dan pencegahan fraud 0,877 dan menunjukkan bahwa untuk setiap konstruk atau variabel nilainya > 0,5. Dengan demikian dapat disimpulkan model dalam penelitian ini telah memiliki *discriminant validity* yang baik.

3. Evaluasi Structural Model

Tabel 3. Hasil R Squared

Variabel	R Squared	Adj R Square
SPI		
Perilaku Etis	0.342	
<i>Fraud</i>		0.346

Sumber: data primer yang diolah (2024)

Koefisien determinasi menggunakan *R-squared* yang menunjukkan berapa persentase variansi konstruk endogen/kriterium dapat dijelaskan oleh konstruk yang dihipotesiskan mempengaruhinya (eksogen/prediktor). Semakin tinggi *R-squared* menunjukkan model yang baik. *R-squared* hanya ada untuk konstruk endogen. Sebagai contoh, *R-squared* konstruk sebesar 0,342 menunjukkan bahwa variansi variabel independen penerapan SAP dan kualitas aparatur dapat dijelaskan sebesar 34,20% oleh variansi variabel dependen yaitu pencegahan *fraud*.

Pengujian Hipotesis Dengan Path Coefficient

Tabel 4. Hasil Path Coefficient

Variabel / Konstruk	P. Value	Path Coefficient	Hasil
H1 Penerapan SAP-> pencegahan <i>Fraud</i>	0,007	3,789	Diterima
H2 Perilaku Etis-> <i>Fraud</i>	0,008	2,391	Diterima

Nilai pengaruh positif atau negatif dapat dilihat dari jalur koefisien di tabel 4. Nilai p juga digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Hipotesis diterima jika nilai $p < 0,05$. Untuk variabel penerapan SAP dengan nilai P Value $0,007 < \text{lebih kecil dari } 0,05$ maka variabel penerapan SAP bisa di terima, dan untuk variabel perilaku etis juga diterima karena memiliki nilai $0,008 < \text{lebih kecil dari } 0,05$.

a. Pengujian Hipotesis 1**Hipotesis 1: Penerapan SAP berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud***

Berdasarkan Tabel 4 *Path Coefficient* terlihat bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* berpengaruh signifikan dengan arah positif, ini dapat dilihat dari variabel penerapan SAP pada *p-value* sebesar $0,007$ atau lebih kecil dari $< 0,05$ yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara penerapan SAP terhadap pencegahan *fraud* adalah signifikan. Dengan demikian hipotesis pertama diterima.

b. Pengujian Hipotesis 2**Hipotesis 2: Kualitas aparatur pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.**

Berdasarkan Tabel 4 *Path Coefficient* terlihat bahwa kualitas aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* berpengaruh, ini dapat dilihat dari variabel perilaku etis pada *p-value* sebesar $0,00$ atau lebih kecil dari $< 0,05$ yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara kualitas aparatur terhadap pencegahan *fraud* adalah berpengaruh. Dengan demikian hipotesis kedua diterima.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap *Fraud Triangel*

Dari pengujian hasil penelitian, terdapat pengaruh signifikan variabel penerapan SAP terhadap pencegahan *Fraud*. Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa semakin tingginya tingkat penerapan SAP dan baiknya penerapan SAP maka angka pencegahan *fraud* akan bisa dicegah dengan semakin tinggi hal ini dikarenakan suatu penerapan SAP yang mengikuti aturan maka akan mempengaruhi pencegahan *fraud*. Hal ini mencerminkan kejadian kota Pekalongan, yaitu untuk penerapan SAP sudah baik sesuai dengan aturan yang berlaku dan *update* untuk semua aturan dan penerapannya serta implementasinya dari pengelolaannya SAP nya juga sudah baik dan pelaksanaan atau implementasinya.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh [Khairan et al., \(2024\)](#), dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel XI akuntansi sektor publik memiliki dampak signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada daerah kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul Dampak Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Terhadap Pencegahan *Fraud* (Studi Kasus Kabupaten Aceh Utara. Dan <https://doi.org/10.58835/jspi.v4i2.331>

sesuai dengan penelitian oleh [Sari \(2022\)](#), dengan judul faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Laporan Keuangan. Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik secara partial maupun secara bersama-sama ([Pambelum, 2018](#)).

Pengaruh kualitas aparatur berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *Fraud*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Kualitas aparatur pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap *Fraud Triangel*. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas aparatur pemerintah di kota Pekalongan untuk posisi dan jabatannya sudah diterapkan dengan baik untuk mencegah *Fraud*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas aparatur pemerintah yang baik dapat mempengaruhi pencegahan *fraud*. Hal ini bisa dibuktikan di kota Pekalongan untuk kualitas aparatur untuk jabatan posisi dan *job desk* sudah disesuaikan dengan profil lulusan dan *skill* yang dibutuhkan serta di sesuaikan dengan hal nya apa saja yang dibutuhkan di instansi pemerintah di mana bagian administrasi di isi oleh seseorang yang berasal dari *background* Pendidikan administrasi, bagian keuangan diisi oleh seseorang dari lulusan keuangan dan akuntansi hal ini bisa digunakan untuk mencegah adanya *fraud* laporan keuangan dan dapat mempengaruhi pencegahan *fraud* laporan keuangan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitiannya yang dilakukan oleh [Triwahyudi \(2020\)](#), mengenai pencegahan *fraud* dengan hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* melalui kualitas laporan keuangan. Kompetensi Aparatur (SDM) berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* laporan keuangan ([Sari, 2024](#)).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan bahwa penerapan SAP dan kualitas aparatur pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* laporan keuangan. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa semakin tingginya tingkat penerapan SAP dan baiknya Penerapan SAP maka dapat mencegah terjadinya pencegahan *Fraud* laporan keuangan hal ini dikarenakan suatu penerapan SAP yang mengikuti aturan dari maka akan mempengaruhi pencegahan *fraud*. Hal ini mencerminkan kejadian kota Pekalongan, yaitu untuk penerapan SAP sudah baik sesuai dengan aturan yang berlaku dan *update* untuk semua aturan dan penerapannya serta implementasinya dari pengelolaannya SAP nya juga sudah baik dan pelaksanaan atau implementasinya. Dan untuk variabel kualitas aparatur pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap *Fraud Triangel*. Ini menunjukkan bahwa kualitas aparatur pemerintah di kota Pekalongan untuk posisi dan jabatannya sudah diterapkan dengan baik untuk mencegah *Fraud*. Meskipun penelitian ini telah dirancang dengan baik, hasilnya masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh

karena itu, ada beberapa saran yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya. Saran-saran ini termasuk penelitian menggunakan metode lain seperti wawancara, memperluas objek penelitian, dan menambahkan variabel seperti variabel profesional kerja, SPI (Sistem Pengendalian Internal) yang mungkin mempengaruhi *Fraud Triangel*.

REFERENSI

- Basuki, B., Widyanti, R., & Anhar, D. (2022). PERANAN KNOWLEDGE MANAGEMENT DAN PRIORITAS KOMPETITIF DALAM MENCAPAI KEBERHASILAN ORGANISASI (Suatu Tinjauan Teoritis). *AL-ULUM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(2). <https://doi.org/10.31602/alsh.v8i2.8603>
- Bernard, R. (2023). *Eks Dirut RSUD di Pekalongan Kembalikan Duit Pengganti Korupsi Rp 1,57 M*. Detik.Com. <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6725399/eks-dirut-rsud-di-pekalongan-kembalikan-duit-pengganti-korupsi-rp-1-57-m>
- Camila, E. M., Azifah, M. R., & Merlinda, S. (2021). Persepsi WPOP Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 6(1), 11–27. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v6i1.577>
- Daniel, K. A., & Yohanes, S. (2013). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.
- Dewi, Catur Kumala, B. D. P. E. A. L. dan. (2020). Analisis Kesesuaian Antara Kebijakan Akuntansi Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Pemerintah Kota Samarinda. *Dedikasi*, 21(2), 48. <https://doi.org/10.31293/ddk.v21i2.5003>
- Garner, B. (2004). Black's Law Dictionary. In *West - Thomson: Vol 8 th ed*.
- Khairan, U., Ikhyanuddin, I., Murhaban, M., & Firdaus, R. (2024). DAMPAK PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD (Studi Kasus Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 2(3), 371. <https://doi.org/10.29103/jam.v2i3.10689>
- Lailatul Mukaromah, & Paulinus, P. (2022). Pengaruh Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Sebi: Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 183–189. <https://doi.org/10.37567/sebi.v3i2.934>
- Maqdllyan, R. (2022). Determinan Implementasi Akuntansi Akrua Terhadap Akuntabilitas Sektor Publik : Pendekatan Teori Institusional. *Jwm (Jurnal Wawasan Manajemen)*, 10(3), 198–203. <https://doi.org/10.20527/jwm.v10i3.218>
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. In *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nurhayati, S. (2012). Metodologi Penelitian Praktis. In *Universitas Pekalongan Press*.
- Pambelum, U. S. dan Y. J. (2018). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *Zhurnal Ushnykh Nosovykh i Gorlovykh Boleznei*, 25(3), 73.
- Primastiw, A., Wardhani, D. K., & Iswahyuni, D. (2020). Pengaruh Penegakan Peraturan, Budaya Etis Organisasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 28(2), 176–187. <https://doi.org/10.32477/jkb.v28i2.209>
- Sari, fangela myas. (2022). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, Good Governance Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Batang). 3(1), 27–42.
- Sari, F. M. (2024). PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN PERILAKU ETIS TERHADAP FRAUD TRIANGEL THEORY. *Jurnal Pro Bisnis*, 17(1), 65–72.
- Selena, M. (2022). *41 Laporan Keuangan Pemda Bermasalah*. Wwww.Harianjogja.Com. <https://news.harianjogja.com/read/2022/10/08/500/1114047/41-laporan-keuangan-pemda-bermasalah>
- Triwahyudi, A. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Yang Berimplikasi Pada Pencegahan Fraud Pada Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–6. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6878>
- Yamin dan Kurniawan. (2011). Generasi Baru Mengolah Data Penelitian dengan Partial Least Square Path Modeling: Aplikasi dengan Software XLSTAT, SmartPLS, dan Visual PLS. In *Salemba Infotek*. Salemba Infotek.